

Kemiskinan Pedesaan dan Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia

Yulianto Umar Rofi'i^{1*}

^{1*} Program Studi Bisnis Digital, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Bali,
Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Indonesia

Abstrak. *Kajian ini menganalisis pengaruh kemiskinan pedesaan terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia. Menggunakan data time series selama periode 1998-2021, model analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana. Kajian mengungkapkan bahwa angka partisipasi sekolah dan tingkat kemiskinan pedesaan di Indonesia berfluktuasi sepanjang tahun. Hasil estimasi mengindikasikan bahwa kemiskinan pedesaan berpengaruh negatif terhadap angka partisipasi sekolah baik untuk level sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Karena itu, upaya peningkatan partisipasi sekolah di Indonesia harus sejalan dengan upaya penurunan tingkat kemiskinan pedesaan.*

Kata kunci: *Angka Partisipasi Sekolah; Kemiskinan Pedesaan; Regresi Linier Sederhana.*

Abstract. *This study analyzes the influence of rural poverty on school enrollment rates in Indonesia. Using time series data for the period 1998-2021, the analysis model used is simple linear regression. The study revealed that school enrollment rates and rural poverty levels in Indonesia fluctuate throughout the year. The estimation results indicate that rural poverty has a negative effect on school enrollment rates at both elementary school, middle school and high school levels. Therefore, efforts to increase school participation in Indonesia must be in line with efforts to reduce rural poverty levels.*

Keywords: *School Enrollment Rates; Rural Poverty; Simple Linier Regression.*

* Corresponding Author. Email: yuliantoumarrofii1@gmail.com ^{1*}.

Pendahuluan

Di Indonesia, kemiskinan telah menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan Indonesia. Sebagian besar masyarakat miskin di Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kemiskinan pedesaan. Pada tahun 1998 tingkat kemiskinan pedesaan sebesar 25,72 persen. Pada tahun berikutnya meningkat menjadi 26,03 persen dan kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 22,38 persen pada tahun 2000. Pada tahun-tahun berikutnya, tingkat kemiskinan pedesaan di Indonesia berfluktuasi dan secara rata-rata cenderung mengalami penurunan. Hingga periode 2021, tingkat kemiskinan pedesaan di Indonesia sebesar 13,10 persen, masih lebih tinggi dibandingkan kemiskinan perkotaan sebesar 7,89 persen (BPS Indonesia, 2024).

Secara teoritis, kemiskinan yang dialami oleh suatu komunitas tidak merefleksikan rendahnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar (Kende-Robb, 2003; Mood & Jonsson, 2016), tetapi juga berdampak pada variabel sosial lainnya termasuk pendidikan anak dalam keluarga. Kemiskinan dianggap telah menjadi salah satu tantangan dalam upaya meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan anak (Engle & Black, 2008). Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk mengatasi masalah ini, namun dampak kemiskinan terhadap angka partisipasi sekolah masih menjadi perhatian utama dalam pembangunan pendidikan.

Berkaitan dengan angka partisipasi sekolah, Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat bahwa angka partisipasi ini berfluktuasi dari tahun ke tahun. APS yang dimaksudkan dibatasi hanya pada APS pendidikan dasar (SD/sederajat), menengah pertama (SLTP) dan APS pendidikan menengah atas (SLTA). APS pendidikan dasar merefleksikan persentase anak usia 7-12 tahun yang memperoleh pendidikan dasar. Pada tahun 1998 APS pendidikan ini sebesar 95,06 persen. Angka ini cenderung meningkat pada periode tahun berikutnya hingga menjadi sebesar 99,21 persen pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021, angka ini menurun menjadi sebesar 99,12 persen. APS pendidikan menengah pertama

dan menengah atas, adalah persentase anak usia 14-15 tahun yang memperoleh pendidikan menengah pertama (SLTP), dan APS pendidikan menengah atas adalah persentase usia 16-18 tahun yang memperoleh pendidikan tersebut. APS untuk dua kelompok pendidikan menengah ini juga cenderung mengalami peningkatan. Hingga tahun 2021, APS pendidikan ini masing-masing sebesar 95,85 persen dan 70,74 persen.

Perubahan APS masing-masing kelompok pendidikan seperti diuraikan di atas tentunya dapat dikaitkan dengan sejumlah faktor diantaranya tingkat kemiskinan pedesaan. Hal ini disebabkan, sebagian besar anak usia sekolah di Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Dalam kontek rumah tangga, kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak sangat ditentukan oleh kondisi keuangan keluarga. Ketika suatu keluarga masuk dalam katagori miskin, kondisi ini tidak hanya berdampak buruk pada keputusan yang mereka buat dalam memenuhi kebutuhan sandang dan pangan bagi keluarga, tetapi juga menurunkan kemampuan mereka dalam membiayai pendidikan anak. Dengan kata lain, keputusan suatu keluarga termasuk dalam memberikan pendidikan bagi anak, terkait dengan kondisi keuangan keluarga (Adamkovic & Martoncik, 2017). Dalam lingkup komunitas, adanya perbaikan kondisi finansial masyarakat berdampak secara langsung pada kemampuan mereka dalam membiayai pendidikan anak yang kemudian dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah secara umum.

Mengacu pada uraian di atas, yang menjadi pertanyaan penting adalah, apakah perubahan APS di Indonesia terkait dengan kemiskinan pedesaan?. Selama ini, bukti empiris mengenai arah dan signifikansi hubungan fungsional antara kemiskinan pedesaan dan angka partisipasi sekolah, belum banyak diungkapkan oleh para peneliti ekonomi. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tersebut dengan menganalisis secara komprehensif pengaruh kemiskinan pedesaan terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan

berkelanjutan, serta meningkatkan kesetaraan akses pendidikan bagi semua anak di Indonesia, terutama yang tinggal di wilayah pedesaan.

Tinjauan Literatur

Kemiskinan merupakan variabel makro ekonomi yang keberadaannya sering menjadi fokus kajian peneliti ekonomi (Amri *et al.*, 2023; Amri *et al.*, 2024). Kemiskinan yang tinggi dianggap sebagai indikator buruk bagi suatu perekonomian karena dapat berdampak negatif pada sejumlah variabel lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan bahkan kondisi sosial politik dalam komunitas masyarakat tertentu. Karena itu, capaian kinerja pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sering menjadikan penurunan tingkat kemiskinan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilannya (Adnan & Amri, 2023). Implementasi kebijakan pemerintah melalui penggunaan belanja publik sering diukur dari efektivitas kebijakan tersebut dalam menurunkan tingkat kemiskinan (Siregar *et al.*, 2023).

Kemiskinan yang dialami oleh sebagian masyarakat dapat berdampak pada kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan, termasuk kebutuhan akan layanan jasa pendidikan, dan bahkan sebaliknya, capaian pendidikan juga sering dihubungkan dengan tingkat kemiskinan (Firdausi & Dewi, 2022). Literatur mengenai pendidikan dan kemiskinan memberikan perhatian khusus pada sejauhmana masyarakat miskin dapat mengakses layanan pendidikan. Penjelasannya semakin rumit karena pentingnya elemen konteks sosio-ekonomi dan budaya siswa, atribut individual mereka, serta ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pendidikan itu sendiri (Blanco, 2011; Rasmussen *et al.*, 2023). Secara teori, faktor ekonomi dan sosio kultural masyarakat berdampak terhadap kemampuan mereka dalam memperoleh pendidikan (Noguera, 2011; Flecha & Buslon, 2016). Karena itu, kemiskinan yang dialami masyarakat sering dilihat sebagai faktor penyebab terjadinya perubahan pada sejumlah variabel sosial lainnya termasuk capaian pendidikan. Bahkan kemiskinan yang tinggi sering dikaitkan dengan

tingkat pendidikan yang rendah, dan hubungan antara kedua variabel ini sering menjadi fokus kajian para peneliti ekonomi (Brown & Park, 2002).

Adanya keterkaitan antara kemiskinan dengan capaian pendidikan anak dapat dijelaskan secara logis bahwa kemampuan untuk memberikan pendidikan bagi anak terkait dengan kondisi keuangan setiap keluarga. Bahkan sejumlah kajian empiris membuktikan bahwa capaian pendidikan anak secara langsung berhubungan dengan kemampuan orang tua mereka dalam membiayai pendidikan (Elliott, 2013). Kesulitan finansial yang dihadapi rumah tangga tidak hanya berdampak buruk pada kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga capaian pendidikan anak (McGovern & Rokicki, 2023). Keluarga dengan kemampuan ekonomi yang rendah, akan kesulitan untuk membiayai biaya pendidikan anak mereka. Karena itu, kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya tingkat pencapaian pendidikan (Filmer, 2000). Adanya hubungan terbalik antara kemiskinan dan capaian pendidikan juga dibuktikan dalam kajian Mihai *et al.* (2015) yang mengungkapkan bahwa kesempatan seseorang anak untuk memperoleh pendidikan sering kali hilang disebabkan anak tersebut berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu membiayai biaya pendidikan.

Penjelasan argumentatif seperti dikemukakan di atas memperkuat konsep pemikiran bahwa angka partisipasi sekolah terkait dengan tingkat kemiskinan. Angka partisipasi sekolah pada dasarnya merefleksikan partisipasi anak usia sekolah dalam mengakses layanan pendidikan, baik pada tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama dan menengah atas. Kemiskinan menjadi faktor penghambat bagi setiap orang untuk membiayai pendidikan anak yang pada gilirannya angka partisipasi pendidikan secara umum.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan data *time series* tahunan selama periode 1998-2021 ($n=24$). Data bersumber dari laporan statistik Indonesia yang dipublikasikan oleh BPS Indonesia.

Variabel yang diprediksi adalah angka partisipasi sekolah yang dikelompokkan dalam tiga kelompok, partisipasi sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan partisipasi sekolah menengah atas. Ketiga angka partisipasi sekolah tersebut masing-masing diproksi dari angka partisipasi sekolah anak usia 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun, yang kemudian dinyatakan dengan satuan persen. Selanjutnya *predictor variable* adalah kemiskinan pedesaan merupakan rasio jumlah penduduk pedesaan yang masuk dalam katagori miskin terhadap total penduduk pedesaan yang juga dinyatakan dalam persen.

Untuk mengestimasi pengaruh tingkat kemiskinan pedesaan terhadap masing-masing APS digunakan regresi linier sederhana. Mengingat variabel dependen (APS) terdiri dari tiga kelompok seperti dijelaskan di atas, maka penerapan regresi linier dalam penelitian ini juga dinyatakan dalam tiga bersamaan seperti di bawah ini.

$$APS_{(7-12)t} = \alpha + \beta MSKD_t + \mu_1 \quad (1)$$

$$APS_{(13-15)t} = \alpha + \beta MSKD_t + \mu_2 \quad (2)$$

$$APS_{(16-18)t} = \alpha + \beta MSKD_t + \mu_3 \quad (3)$$

Keterangan:

$APS_{(7-12)t}$: Angka partisipasi sekolah pendidikan dasar pada tahun t.

$APS_{(13-15)t}$: Angka partisipasi sekolah pendidikan menengah pertama pada tahun t.

$APS_{(16-18)t}$: Angka partisipasi sekolah pendidikan menengah atas pada tahun t.

$MSKD_t$: Tingkat kemiskinan pedesaan pada tahun t.

α : Konstanta

β : Koefisien estimasi

μ_1, μ_2, \dots : error term

μ_3

Pengujian signifikansi pengaruh kemiskinan pedesaan terhadap angka partisipasi sekolah mengacu pada nilai *p-value* yang dihasilkan melalui proses pengolahan data. Ketentuan signifikansi pengaruh tersebut berlaku ketentuan, jika *p-value* < 0,05 mengindikasikan bahwa kemiskinan pedesaan berpengaruh signifikan terhadap angka partisipasi sekolah.

Interpretasi sebaliknya berlaku ketika nilai *p-value* > 0,05. Penggunaan nilai *p-value* sebagai tolok ukur penentuan signifikansi koefisien estimasi variabel independen terhadap variabel dependen mengacu pada Amri *et al.* (2021), Fahira *et al.* (2023) dan Amri (2023).

Hasil dan Pembahasan

Seperti dijelaskan dalam bagian data dan model analisis, kemiskinan pedesaan diukur dari rasio penduduk miskin terhadap total penduduk yang tinggal di daerah pedesaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa selama periode 1998-2021, tingkat kemiskinan pedesaan di Indonesia relatif fluktuatif, dan secara umum cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 1998 misalnya, sebesar 25,72 persen dari penduduk yang tinggal di daerah pedesaan masuk katagori miskin. Angka ini meningkat pada periode berikutnya hingga menjadi sebesar 26,03 persen. Sebaliknya, pada tahun 2000 tingkat kemiskinan pedesaan menurun menjadi 22,38 persen, dan kemudian meningkat lagi hingga menjadi 24,84 persen pada tahun 2001. Hingga tahun 2021, tingkat kemiskinan pedesaan di Indonesia mencapai sebesar 13,10 persen jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2002 sebesar 21,10 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan melalui sejumlah kebijakan yang telah dilakukan, dapat dikatakan berhasil. Terutama dalam 10 tahun terakhir, tingkat kemiskinan pedesaan di Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan periode sebelum 2010.

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa selama periode tahun tersebut, nilai maksimum tingkat kemiskinan pedesaan sebesar 26,03 persen. Angka ini merupakan tingkat kemiskinan tertinggi yang terjadi pada tahun 1999. Sebaliknya tingkat kemiskinan terendah sebesar 12,6 persen. Capaian penurunan angka kemiskinan ini terjadi pada tahun 2019. Selanjutnya rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 17,8 persen.

Berkaitan dengan angka partisipasi sekolah (APS), penelitian menemukan bahwa angka partisipasi sekolah di Indonesia relatif berbeda

berdasarkan tiga katagori atau kelompok anak usia sekolah, terdiri dari APS sekolah dasar (anak usia 7-12 tahun), APS sekolah menengah pertama (anak usia 13-15 tahun) dan APS sekolah menengah atas (anak usia 16-18 tahun). Namun secara umum cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari parameter statistik deskriptif masing-masing APS. Angka partisipasi sekolah untuk pendidikan dasar (7-

12 tahun) misalnya, diperoleh angka maksimum dan menimum masing-masing sebesar 99,21 persen dan 95,06 persen, dengan nilai rata-rata sebesar 97,61 persen. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil statistik deskriptif kemiskinan pedesaan dan APS pendidikan dasar, menengah pertama dan menengah atas dapat dilihat Tabel 1.

Tabel 1. Hasil statistik deskriptif

Parameter Statistik	Kemiskinan pedesaan (%) (MSKD)	Angka partisipasi sekolah (%)		
		APS ₍₇₋₁₂₎ (SD)	APS ₍₁₃₋₁₅₎ (SLTP)	APS ₍₁₆₋₁₈₎ (SLTA)
Mean	17,808	97,607	87,314	59,740
Median	16,955	97,886	85,770	55,440
Maximum	26,030	99,212	95,845	71,917
Minimum	12,600	95,060	77,160	49,180
Std. Dev,	4,351	1,347	6,446	8,809
Jarque-Bera	1,989	1,954	2,112	2,954
Probability	0,369	0,377	0,348	0,228
Obs	24	24	24	24

Sumber: Data sekunder (Diolah), 2024.

Tabel 1 di atas memperlihatkan bahwa angka partisipasi sekolah untuk kelompok pendidikan menengah pertama (SLTP) dan menengah atas (SLTA) juga berbeda. Indikasi ini secara statistik ditunjukkan oleh nilai maksimum, minimum dan nilai rata-rata masing-masing APS. Berkaitan dengan APS pendidikan menengah pertama misalnya, diperoleh nilai rata-rata sebesar 87,31 persen. Angka ini dapat diinterpretasikan bahwa selama periode 1998-2021, secara rata-rata anak dengan usia berkisar antara 13-15 tahun yang memperoleh pendidikan menengah pertama hanya sebesar 87,31 persen dari total seluruh anak. Selanjutnya, APS pendidikan menengah atas (anak usia berkisar antara 16-18 tahun) diperoleh nilai rata-rata sebesar 49,28 persen. Angka ini berarti bahwa secara rata-rata, anak dalam kelompok usia tersebut yang memperoleh pendidikan hanya 49,28 persen dari total anak di Indonesia. Persentase ini jauh lebih kecil dibandingkan rata-rata APS pendidikan menengah pertama. Dengan demikian dapat diartikan bahwa partisipasi anak untuk mengikuti pendidikan menengah atas jauh lebih rendah dibandingkan dengan partisipasi mengikuti pendidikan dasar dan

menengah pertama. Angka-angka statistik ini juga memberikan informasi empiris bahwa partisipasi pendidikan sekolah dikalangan anak usia sekolah mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan itu sendiri.

Hasil estimasi

Penelitian ini menemukan bahwa kemiskinan pedesaan berpengaruh negatif terhadap angka partisipasi pendidikan untuk ketiga kelompok tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien estimasi kemiskinan terhadap masing-masing kelompok APS yakni sebesar -0,293 untuk APS pendidikan dasar (SD), -1,406 untuk APS pendidikan menengah pertama (SLTP), dan sebesar -1,827 untuk APS pendidikan menengah atas (SLTA). Secara statistik dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat kemiskinan semakin rendah partisipasi pendidikan anak untuk ketiga kelompok tingkatan pendidikan. Pengaruh negatif tersebut sangat signifikan dengan nilai *p-value* masing sebesar 0,000. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil estimasi dapat dilihat Tabel 2.

Tabel 2. Hasil estimasi

Constanta dan predictors variable	Dependent variable: APS		
	APS ₍₇₋₁₂₎ (SD)	APS ₍₁₃₋₁₅₎ (SLTP)	APS ₍₁₆₋₁₈₎ (SLTA)
C (β_0)	102,834 [268,384] (0,000)	112,356 [61,752] (0,000)	92,282 [27,117] (0,000)
MSK(β_1)	-0,293*** [-14,026] (0,000)	-1,406*** [-14,152] (0,000)	-1,827*** [-9,832] (0,000)
R ²	0,899	0,901	0,815
Adjusted R ²	0,894	0,897	0,806
F-statistic	196,717	200,267	96,677
Prob(F-stat)	0,000	0,000	0,000
D-W	0,972	1,031	0,505
Normalitas Residual			
J-B	0,059	1,971	1,844
Prob	0,970	0,373	0,398
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
F-statistic	1,923 (0,179)	1,306 (0,265)	0,041 (0,841)
Obs*R ²	1,929 (0,164)	1,345 (0,246)	0,044 (0,832)
Scaled explained SS	1,542 (0,214)	0,399 (0,527)	0,013 (0,907)
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	3,613 (0,045)	3,078 (0,068)	10,969 (0,001)
Obs*R ²	6,370 (0,041)	5,648 (0,059)	12,554 (0,002)

Sumber: Data sekunder (Diolah), 2024).

***, masing-masing mengindikasikan signifikan pada keyakinan 90%, 95% dan 97,5%.

Kemiskinan pedesaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap angka partisipasi sekolah dasar. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien estimasi sebesar -0,293 dengan *p-value* sebesar 0,000 (< 0,05). Peningkatan kemiskinan pedesaan sebesar 1 persen mendorong penurunan angka partisipasi sekolah dasar sebesar 0,293 persen. Dengan kata lain, terdapat hubungan yang tidak searah antara angka partisipasi sekolah anak usia 7-12 tahun dengan tingkat kemiskinan. Semakin tinggi kemiskinan pedesaan semakin rendah angka partisipasi sekolah untuk kelompok usia tersebut. Sebaliknya, partisipasi sekolah meningkat ketika tingkat kemiskinan pedesaan menurun.

Tabel di atas juga memperlihatkan bahwa kemiskinan pedesaan juga secara negatif dan

signifikan mempengaruhi angka partisipasi sekolah menengah pertama (SLTP), dengan koefisien estimasi sebesar -1,406 (*p-value* = 0,000 < 0,05). Setiap 1 persen kenaikan tingkat kemiskinan pedesaan, menurunkan angka partisipasi sekolah sebesar 1,41 persen. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan efek kemiskinan terhadap partisipasi sekolah dasar yakni sebesar 0,293 persen. Hasil statistik ini menjelaskan bahwa efek negatif kemiskinan terhadap APS pendidikan menengah pertama lebih besar lebih dibandingkan terhadap APS pendidikan dasar. Perbedaan pengaruh negatif ini memberikan penjelasan statistik bahwa kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anak mereka sangat terkait dengan kemampuan keuangan keluarga. Jenjang pendidikan menengah seperti halnya SLTP biasanya membutuhkan biaya relatif lebih besar

dibandingkan jenjang pendidikan pertama (SD). Akibatnya, pada kelompok masyarakat miskin, sebagian dari mereka hanya mampu memenuhi kebutuhan anak mereka pada tingkat sekolah dasar. Dengan kata lain, sebagian dari kelompok miskin tidak memiliki kemampuan keuangan yang mencukupi untuk melanjutkan pendidikan anak mereka ke jenjang sekolah menengah pertama. Hal inilah yang menyebabkan adanya pengaruh negatif yang lebih besar dalam hubungan APS pendidikan menengah pertama dengan tingkat kemiskinan. Kemiskinan pedesaan juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap APS pendidikan menengah atas (SLTA). Bahkan pengaruh negatif variabel makro ekonomi ini lebih besar dibandingkan dengan terhadap dua kelompok APS seperti dijelaskan sebelumnya. Peningkatan tingkat kemiskinan sebesar 1 persen mendorong penurunan APS pendidikan menengah atas sebesar 1,827 persen. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan pengaruh kemiskinan terhadap APS pendidikan menengah pertama. Hasil statistik ini juga memperkuat bukti empiris bahwa kemampuan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan anak mereka ke jenjang pendidikan SLTA, relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan kemampuan untuk memberikan pendidikan SD dan SLTP. Keterbatasan kemampuan keuangan keluarga dapat menjadi faktor penghalang utama bagi orang tua untuk melanjutkan pendidikan anak mereka ke jenjang pendidikan menengah atas. Sebagian diantara anak yang berasal dari keluarga miskin hanya mampu memperoleh pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama. Hal inilah yang menyebabkan adanya efek negatif lebih besar dari kemiskinan pedesaan terhadap APS pendidikan menengah atas.

Adanya pengaruh negatif kemiskinan pedesaan terhadap angka partisipasi sekolah seperti dijelaskan di atas, mengkonfirmasi pendapat Ferguson *et al.* (2007) yang menyatakan bahwa anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah sering kali memiliki hambatan yang besar dalam melanjutkan pendidikan dibandingkan anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. Bahkan sebagian dari mereka terancam putus sekolah akibat ketidakmampuan orang tua mereka dalam membiayai biaya pendidikan.

Temuan penelitian sejalan dengan hasil kajian Shapiro & Oleko Tambashe (2001) dan Humble & Dixon (2017) yang mengungkapkan kemampuan keuangan rumah tangga menjadi determinan penting capaian pendidikan anak. Semakin baik kemampuan keuangan keluarga, semakin tinggi angka partisipasi sekolah yang pada gilirannya secara langsung berdampak pada capaian pendidikan. Sebaliknya, dalam keluarga miskin, partisipasi sekolah anak relatif lebih rendah, dan hal ini juga berdampak buruk pada capaian pendidikan anak secara umum.

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan Implementatif

Angka partisipasi sekolah di Indonesia berfluktuasi dari tahun ke tahun dan secara umum mengalami peningkatan, baik untuk sekolah dasar, menengah pertama maupun menengah atas. Secara teoritis dan empiris, kemampuan masyarakat memberikan layanan pendidikan anak terkait dengan kemampuan keuangan keluarga. Dalam keluarga miskin yang tinggal di pedesaan, biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan terasa lebih berat, yang pada gilirannya berdampak ada angka partisipasi sekolah secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan pedesaan terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia. Menggunakan data runut waktu periode 1998-2021, hasil penelitian menyimpulkan bahwa kemiskinan pedesaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap partisipasi sekolah. Semakin tinggi tingkat kemiskinan semakin rendah partisipasi sekolah. Pengaruh negatif kemiskinan terhadap partisipasi sekolah lebih signifikan untuk pendidikan menengah pertama (SLTP) dan menengah atas (SLTA). Temuan ini mengindikasikan bahwa secara umum kemampuan keuangan keluarga menjadi faktor penting dalam menentukan partisipasi sekolah anak.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka diperlukan langkah-langkah konkret yang dapat mengatasi hambatan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan, baik pendidikan dasar maupun pendidikan menengah seperti SLTP

dan SLTA. Melalui program bantuan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan, keluarga miskin dapat diberi dukungan untuk mengakses pendidikan tanpa harus merasakan beban finansial yang berat. Selain itu, pembangunan infrastruktur pendidikan yang terjangkau dan berkualitas, termasuk fasilitas transportasi dan akses internet, serta penguatan sekolah pedesaan melalui peningkatan kualifikasi guru dan fasilitas pembelajaran, dapat memberikan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah.

Kebijakan lainnya yang dapat dilakukan pemerintah adalah membangun kolaborasi aktif dengan organisasi masyarakat dan praktisi pendidikan agar dapat merancang program pendidikan yang lebih efektif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat terutama mereka yang masuk dalam kelompok miskin. Dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi serta komitmen yang kuat dari berbagai pihak, diharapkan dapat memperbaiki angka partisipasi sekolah dan meningkatkan akses serta kualitas pendidikan di pedesaan yang terdampak kemiskinan.

Daftar Pustaka

- Adamkovič, M., & Martončík, M. (2017). A Review of Consequences of Poverty on Economic Decision-Making: A Hypothesized Model of a Cognitive Mechanism. *Frontiers in Psychology*, 8. doi:10.3389/fpsyg.2017.01784.
- Adnan, G., & Amri, K. (2021). Do gender empowerment and democracy reduce poverty rate? A cross-provinces evidence from western Indonesia. *Economics & Sociology*, 14(3), 54-71.
- Amri, K. (2023). Pengaruh yield rate dan inflasi terhadap risiko pembiayaan mudharabah: Peran pandemic Covid-19 sebagai pemoderasi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 31 (2), 215–240
- Amri, K., Adnan, M., & Juliany, J. (2021). Pendidikan pesantren dan ketimpangan pendapatan (Bukti data panel di Aceh. *Pencerahan: Jurnal Pendidikan*, 15 (2), 87-109
- Amri, K., Fitri, C. D., Ikhsan, I., & Sani, S. R. (2023). Kontribusi pendapatan perempuan dalam menurunkan tingkat kemiskinan: Bukti data panel di provinsi Riau. *Jurnal Selodang Mayang*, 9(3), 199-205.
- Amri, K., Masbar, R., Nazamuddin, B. S., & Aimon, H. (2024). Does unemployment moderate the effect of government expenditure on poverty? A cross-provinces data evidence from Indonesia. *Economic Studies journal*, (2), 92-113.
- Blanco, E. (2011). Efectos escolares sobre los aprendizajes en México: una perspectiva centrada en la interacción escuela-entorno. *Papeles de población*, 17(69), 219-256
- Brown, P. H., & Park, A. (2002). Education and poverty in rural China. *Economics of Education Review*, 21(6), 523-541. [https://doi.org/10.1016/S0272-7757\(01\)00040-1](https://doi.org/10.1016/S0272-7757(01)00040-1)
- Elliott, W. (2013). The effects of economic instability on children's educational outcomes. *Children and Youth Services Review*, 35(3), 461–471. doi:10.1016/j.childyouth.2012.
- Engle, P. L., & Black, M. M. (2008). The Effect of Poverty on Child Development and Educational Outcomes. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1136(1), 243–256. doi:10.1196/annals.1425.023
- Fahira, C. E., Chalisa, N., Karila, M., Rezalid, R. W., Ramadhani, & Amri, K. (2023). Pengaruh belanja modal terhadap pengangguran di Indonesia. *Journal of Law and Economics* 2 (1), 10–21.

- Ferguson, H., Bovaird, S., & Mueller, M. (2007). The impact of poverty on educational outcomes for children. *Paediatrics & child health*, 12(8), 701–706. <https://doi.org/10.1093/pch/12.8.701>
- Filmer, D. (2000). *The structure of social disparities in education*. World Bank policy research Working Paper No. 2268
- Firdauzi, I., & Dewi, N. M. R. (2022). Analysis of Causality Interactions Between Education, Inequality, and Unemployment Toward Poverty in East Java: Empirical Evidence from Dynamic Panel Co-integration Model. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 6(1), 64-75.
- Flecha, R., & Buslon, N. (2016). 50 Años Después del Informe Coleman. Las Actuaciones Educativas de Éxito sí Mejoran los Resultados Académicos. *International Journal of Sociology of Education*, 5(2), 127–143. <https://doi.org/10.17583/rise.2016.2087>
- Humble, S., & Dixon, P. (2017). The effects of schooling, family and poverty on children's attainment, potential and confidence—Evidence from Kinondoni, Dar es Salaam, Tanzania. *International Journal of Educational Research*, 83, 94–106. doi:10.1016/j.ijer.2017.03.001.
- Kende-Robb, C. M. (2003). Poverty and Social Impact Analysis: Linking Macroeconomic Policies to Poverty Outcomes: Summary of Early Experiences. *IMF Working Papers*, 2003(043), A001. Retrieved Apr 28, 2024, from <https://doi.org/10.5089/9781451846348.001.A001>
- McGovern, M. E., & Rokicki, S. (2023). The great recession, household income, and children's test scores. *Review of Income and Wealth*, 69(3), 555–580. <https://doi.org/10.1111/roiw.12600>.
- Mihai, M., Tițan, E., & Manea, D. (2015). Education and Poverty. *Procedia Economics and Finance*, 32, 855–860. doi:10.1016/s2212-5671(15)01532-4
- Mood, C., & Jonsson, J. O. (2016). The Social Consequences of Poverty: An Empirical Test on Longitudinal Data. *Social indicators research*, 127, 633–652. <https://doi.org/10.1007/s11205-015-0983-9>
- Noguera, P. A. (2011). *A Broader and Bolder Approach Uses Education to Break the Cycle of Poverty*. *Phi Delta Kappan*, 93(3), 8–14. doi:10.1177/003172171109300303
- Rasmussen, H. R. S., Weinschenk, A., Nørgaard, A. S., von Bornemann Hjelmborg, J., & Klemmensen, R. (2023). Educational Attainment Has a Causal Effect on Economic, But Not Social Ideology: Evidence from Discordant Twins. *Political Studies*, 71(1), 256–275. <https://doi.org/10.1177/00323217211008788>
- Shapiro, D., & Oleko Tambashe, B. (2001). Gender, poverty, family structure, and investments in children's education in Kinshasa, Congo. *Economics of Education Review*, 20(4), 359–375. doi:10.1016/s0272-7757(00)0005
- Siregar, N. A., Amri, K., & Riyaldi, M. H. (2023). Peran belanja pemerintah daerah dalam memoderasi pengaruh zakat terhadap kemiskinan di provinsi Aceh. *Journal of Law and Economics*, 2(2), 80–89.